

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KESEHATAN**

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. (0722) 21846
KOTAAGUNG
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rensta-PD) Tahun 2025-2029 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dapat diselesaikan sebagai salah satu publikasi hasil kegiatan Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanggamus selama tahun 2025-2029.

Pembangunan Kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Sebagai acuan untuk pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus telah disusun Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rensta-PD) Tahun 2025-2029.

Akhirnya dengan harapan adanya kemitraan dengan berbagai pihak, pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanggamus untuk mewujudkan Visi : ***“Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas”*** Semoga upaya kita selalu mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kotaagung, Juni 2025



TAUFIK HIDAYAT,SE.,M.Kes
NIP. 19661127 198902 1 001

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB	I	PENDAHULUAN
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN
	2.1	Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan
	2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
	2.1.2	Sumber Daya Dinas Kesehatan
	2.1.3	Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
	2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan
	2.1.5	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
	2.1.6	Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
	2.1.7	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
	2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan
	2.2.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan
	2.2.2	Isu Strategis
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN
	3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan
	3.2	Strategi Renstra Dinas Kesehatan
	3.3	Penahapan Renstra Dinas Kesehatan
	3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan
BAB	IV	PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	4.2	Dukungan Sub Kegiatan Renstra PD pada RPJMN 2025-2029
	4.3	Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi
	4.4	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
	4.5	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
BAB	V	PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.3	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
Tabel	2.1.3	Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
Tabel	2.2.2	Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah
Tabel	3.1	Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Tabel	3.2	Tabel Strategi Perangkat Daerah
Tabel	3.3	Tabel Penahapan Renstra PD Dinas Kesehatan
Tabel	3.4	Tabel Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Tabel	4.1	Tabel Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD Dinas Kesehatan
Tabel	4.1	Tabel Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Tabel	4.1	Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel	4.2	Tabel Subkegiatan pada PD yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029
Tabel	4.2	Tabel Intervensi Perangkat Daerah Pada Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung Dalam Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029
Tabel	4.3	Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi
Tabel	4.4	Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Tabel	4.5	Tabel Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Mengingat perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan Pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan priodisasinya. Aspek penyelarasan yang dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Susunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 sesuai sistematika sebagaimana terlampir. Renstra-PD sebagaimana dimaksud, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rancangan Teknokratik

RPJMD, RPJPD, KLHS RPJMD, RTRW, Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra-PD Provinsi. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Memberikan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

a. Proses Penyusunan Renstra dengan Dokumen lainnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus menyusun rencana strategis secara bersama sama dengan seluruh unit dinas kesehatan serta menampung aspirasi masyarakat melalui musrenbang, dengan metodologi :

1. Persiapan Penyusunan Renstra

- 1) Pembentukan Tim Penyusun Renstra.
- 2) Melakukan Orientasi terhadap Tim Penyusun renstra dalam rangka pemahaman dan penyamaan persepsi tentang perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis, menginterpretasi data.
- 3) Penyusunan agenda kerja Tim penyusun
- 4) Pengumpulan data dan informasi

2. Perumusan rancangan renstra.

- 1) Pengolahan data informasi.
- 2) Analisis kinerja pelayanan kesehatan
- 3) Analisis anggaran dan realisasinya.
- 4) Perbandingan capaian sasaran renstra kabupaten, provinsi dan nasional.
- 5) Telaah struktur ruang wilayah Kabupaten Tanggamus.
- 6) Telaah pola ruang wilayah Kabupaten Tanggamus.
- 7) Analisis dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 8) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
- 9) Identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan bidang kesehatan.
- 10) Identifikasi permasalahan pelayanan bidang kesehatan Kabupaten Tanggamus berdasarkan renstra kementrian kesehatan.
- 11) Identifikasi permasalahan pelayanan bidang kesehatan Kabupaten Tanggamus berdasarkan renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

- 12) Identifikasi permasalahan pelayanan bidang kesehatan Kabupaten Tanggamus berdasarkan telaah RT/RW.
- 13) Indentifikasi isu-isu strategis internasional, nasional, provinsi dan kabupaten.
- 14) Perumusan, penyusunan dan penjelasan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
- 15) Perumusano, penyusunan dan penjelasan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
- 16) Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
- 17) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pembiayaan dan indikator pelayanan bidang kesehatan Kabupaten Tanggamus.
- 18) Perumusan indikator kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanggamus.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Peraturan- peraturan berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 65);
22. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
24. Surat Edaran Bupati Tanggamus Nomor : 050/2247/42/2025 Tanggal 07 Mei 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus tahun 2025 – 2029 adalah sebagai penjabaran dari pembangunan bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang terintegrasi ke dalam arah kebijakan, strategi dan keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Terjabarkannya visi, misi, kedalam strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten Tanggamus;
2. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
3. Penyusunan Rencana Strategis memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan dalam rangka pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
4. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di bidang Kesehatan dalam jangka waktu lima tahun;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 – 2029 mengacu dan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun Sistematika penulisan Renstra sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB	I	PENDAHULUAN
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN
	2.1	Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

		2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
		2.1.2	Sumber Daya Dinas Kesehatan
		2.1.3	Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
		2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan
		2.1.5	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
		2.1.6	Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
		2.1.7	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
		2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan
		2.2.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan
		2.2.2	Isu Strategis
BAB	III		TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN
		3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan
		3.2	Strategi Renstra Dinas Kesehatan
		3.3	Penahapan Renstra Dinas Kesehatan
		3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan
BAB	IV		PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
		4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
		4.2	Dukungan Sub Kegiatan Renstra PD pada RPJMN 2025-2029
		4.3	Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi
		4.4	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
		4.5	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
BAB	V		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi di berbagai bidang kesehatan. Dinas Kesehatan juga bertugas membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan.

Fungsinya meliputi menyusun kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan. Membantu koordinasi antar unit kerja, lintas program, dan lintas sektor di bidang kesehatan. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan kesehatan. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta membuat laporan. Melakukan kegiatan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Fungsi dari Rencana Strategis (Renstra) dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan diantaranya adalah :

1. Sebagai arah dalam menentukan kebijakan pembangunan bidang kesehatan.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan , membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer .
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Matra.
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Kefarmasian.
 - 2. Seksi Alat Kesehatan.
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Jaminan Kesehatan.

- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, membawahi :
26 Unit Pusat Kesehatan Masyarakat.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus tentang keadaan SDM dan asset yang ada di Dinas Kesehatan termasuk puskesmas dan jaringannya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dilengkapi dengan sumberdaya yang dibutuhkan, baik sumber daya manusia (pegawai) maupun sarana prasarana lainnya, baik di Dinas Kesehatan maupun jajarannya yaitu di Puskesmas dan jaringannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan langsung. Pada Tahun 2025 tercatat sejumlah 1496 orang PNS dengan rincian PNS 747 orang dan Non PNS 749 orang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

**Tabel 2.1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanggamus**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	100	93	97	97.5	96.9	88.2	0.93	0.97	0.975	0.969	0.882
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	100	94	98	93.7	92.2	86.5	0.94	0.98	0.937	0.922	0.865
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	100	100	100	96	102	98.4	97.2	90.8	0.96	1.02	0.984	0.972	0.908
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	100	87	88	73.1	94.2	91.1	0.87	0.88	0.731	0.942	0.911
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	33	0	100	90.7	108.7	0.33	0	1	0.907	1.087
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	100	100	100	100	54	47	65.67	92.14	96.14	0.54	0.47	0.6567	0.9214	0.9614

7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	100	100	100	100	75	94	89.9	90.3	92.8	0.75	0.94	0.899	0.903	0.928
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	100	100	100	100	68	35	57.37	91.85	96.13	0.68	0.35	0.5737	0.9185	0.9613
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100	100	100	100	100	89	44	87.95	98.02	98.86	0.89	0.44	0.8795	0.9802	0.9886
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100	100	100	100	84	42	98.85	100	99.82	0.84	0.42	0.9885	1	0.9982
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100	100	100	60	44	63.4	90.2	101.4	0.6	0.44	0.634	0.902	1.014
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100	100	100	100	100	66	59	71	91.3	99.3	0.66	0.59	0.71	0.913	0.993

Tabel 2.1.3 (2) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		811,287,850	4,586,266,950	1,886,293,500	3,073,840,867
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		1,515,511,650	315,262,000	376,120,000	444,975,000
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		232,801,200	40,325,000	460,715,000	984,396,667
Pelayanan Kesehatan Balita		1,289,445,425	12,185,000	1,089,627,500	3,795,761,667
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		325,536,000	14,970,000	864,890,100	354,260,000
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		728,651,000	21,540,000	753,440,000	1,421,542,867
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		870,398,700	1,864,270,600	1,213,730,000	449,075,000
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		268,760,000	12,950,000	472,189,666	455,480,667
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)		183,800,000	12,765,000	410,394,333	449,949,667
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		322,260,000	37,500,000	440,725,000	81,927,800
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		265,416,200	117,475,000	1,214,238,333	1,403,389,600
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)		73,785,000	21,775,000	142,175,000	68,935,000

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	600,320,000	4,243,530,600	1,395,438,016	2,839,369,603		0.739959313	0.925268992	0.739777779	0.923720429		
	492,461,328	0	232,023,050	406,225,500		0.32494724	0	0.616885701	0.91291758		
	85,564,067	0	368,064,466	805,484,767		0.367541349	0	0.798898378	0.818252229		
	1,000,116,598	0	832,645,642	3,676,941,135		0.775617625	0	0.76415623	0.968696525		
	138,776,000	0	713,070,100	351,220,000		0.42630001	0	0.824463247	0.991418732		
	383,690,317	0	629,308,232	1,384,962,967		0.526576258	0	0.835246645	0.974267466		
	845,044,600	1,843,100,100	816,502,700	446,799,090		0.970870706	0.988644084	0.672721857	0.994932005		
	201,979,017	0	377,144,133	453,617,677		0.751521867	0	0.798713229	0.995909837		
	138,300,205	0	313,126,632	435,542,407		0.752449429	0	0.762989659	0.967980285		
	140,820,882	0	301,247,450	81,408,200		0.436979091	0	0.683527029	0.99365783		
	179,383,250	90,325,000	760,184,599	1,385,170,100		0.675856447	0.768886997	0.626058804	0.987017504		
	36,490,000	21,775,000	90,276,500	62,359,750		0.494544962	1	0.63496747	0.904616668		

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan

Kelompok sasaran layanan pada dinas kesehatan yaitu langsung kepada Masyarakat.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

BPJS Menjadi Layanan Mitra Dinas Kesehatan dalam memberikan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat baik secara mandiri maupun PBI dengan sinergi yang baik, dapat mencapai tujuan bersama dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus serta berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJS selaku mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.

Rumah Sakit di Kabupaten Tanggamus terdapat Rumah Sakit Negeri dan Swasta. Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang dan Rumah Sakit Panti Secanti terakreditasi Paripurna yang merupakan Rumah Sakit rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Ke-2 Rumah Sakit ini menjadi mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dalam memberikan layanan Kesehatan pada masyarakat kabupaten Tanggamus serta memastikan pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah dan Swasta sesuai dengan standar dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Kami juga akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kami agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memajukan bidang kesehatan di wilayah tersebut. Rumah Sakit di Kabupaten Tanggamus siap untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam membangun sistem kesehatan yang lebih baik dan memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan PDAM terhadap Dinas Kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap air bersih yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Berikut adalah beberapa cara dimana PDAM dapat memberikan dukungan terhadap Dinas Kesehatan: Penyediaan Air Bersih yang Berkualitas: PDAM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa air yang disediakan sesuai dengan standar kualitas air yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk standar yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Kerjasama dalam Survei Kualitas Air: PDAM dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan survei kualitas air bersih dan memastikan bahwa air yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi standar kualitas air yang ditentukan oleh pemerintah. Edukasi

Kesehatan: PDAM dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih bagi kesehatan dan bagaimana menjaga kualitas air yang dikonsumsi. Ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan relevan. Penanggulangan Wabah Penyakit: PDAM dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit yang disebabkan oleh konsumsi air yang tidak bersih. Ini bisa meliputi peningkatan monitoring kualitas air, peningkatan pemeliharaan jaringan distribusi air bersih, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih bagi kesehatan. Dengan dukungan PDAM, Dinas Kesehatan dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap air bersih yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi, yang merupakan faktor penting untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama Dinas Kesehatan dengan PT INFOKES dalam hal Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan pelayanan prima. Pemantauan data dan layanan kesehatan untuk memudahkan pengambilan keputusan tentang kondisi kesehatan masyarakat saat ini untuk kesehatan di masa mendatang dalam satu basis di Puskesmas.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga untuk mengkaji masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Tanggamus harus ditinjau dari semua aspek baik internal maupun eksternal yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Tanggamus.

2.2.2. Isu Strategis

Tabel 2.2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Masih adanya 9 Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2024	Tingginya angka kematian ibu, yaitu 183 per 100.000 KH (2024)		Menurut data World Health Organization (WHO) dalam Laporan Maternal Mortality, Level and Trends 2000-2020, mencatat pada 2020 Indonesia berada di urutan ke-4 di wilayah Asia Tenggara, dengan angka kematian ibu sebesar 172 per 100.000 kelahiran hidup. Urutan negara dengan angka kematian ibu tertinggi pertama, kedua dan ketiga, masing-masing ditempati oleh Kamboja, Timor Leste, dan Myanmar.		Angka Kematian Ibu (AKI)
	Masih adanya 37 Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2024	Tingginya angka kematian bayi yaitu 3,9 per 1.000 KH (2024)		Angka kematian bayi di Indonesia masih sangat tinggi, melebihi negara-negara maju. Indonesia termasuk yang paling tinggi, yaitu di atas 15 (kematian) per 1.000 (kelahiran bayi). Negara-negara maju bisa di bawah 2 per 1.000.		Angka Kematian Bayi (AKB)
	Pada tahun 2024 Persentase Stunting masih sebesar 17%	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (0-59 Bulan)	Prevalensi Stunting Secara global mencapai 22,3% pda tahun 2022	Indonesia memiliki angka stunting 30,8%		Prevalensi Balita Stunting
	Penemuan kasis TB Paru masih rendah	Jumlah Kasus TB Baru dan Kambuh Pada waktu tertentu per 100.000 penduduk	Estimasi kasus TBC meningkat menjadi 1.060.000 Kasus dan Angka Kematian mencapai 134.000 Per Tahun (2023)	Indonesia Merupakan negara dengan estimasi kasus tertinggi ke -2 di dunia setelah india		Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)
	Kepersertaan Peserta BPJS Kabupaten Tanggamus Sebesar 98,2% pada Tahun 2024	Proporsi Kepersertaan BPJS		Pencapaian Universal Health Coverage yang ditargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024), yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN.		Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan masih rendah					Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Persentase Nilai SPM Bidang Kesehatan masih dibawah 95%					Persentase Capaian SPM Kesehatan

Catatan:

Rumuskan isu strategis dari Permasalahan, Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah dan disajikan dalam bentuk narasi serta penjelasan terkait isu strategis tersebut

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	T1. Meningkatkan Derajat Kesehatan		TI. Angka Harapan Hidup							
		S1.1 Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat	S1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)	82.0	81.0	71.0	69.0	68.0	67.0	
			S1.2 Angka Kematian Bayi (AKB)	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.0	
			S1.3 Prevalensi Balita Stunting	14.2	14.0	13.8	13.6	13.3	13.1	
			S1.4 Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)	418	349	293	252	221	191	
		S1.2 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	S1.5 Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	98.5	98.8	99.1	99.4	99.7	100.0	
			S1.6 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	84.67	84.73	84.83	84.9	85	85.07	
			S1.7 Persentase Capaian SPM Kesehatan	100	100	100	100	100	100	

3.2 Strategi Renstra Dinas Kesehatan

Untuk mewujudkan visi Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi masyarakat yaitu dengan Revitalisasi Fasilitas Kesehatan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Revitalisasi Fasilitas Kesehatan
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	

3.3 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan

Tahap Penerapan Renstra Dinas Kesehatan dalam 5 tahun yang akan datang :

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan Pustu Baru (6 Pustu)	Pembangunan Pustu Baru (5 Pustu)	Pembangunan Pustu Baru (5 Pustu)	Pembangunan Pustu Baru (5 Pustu)	Pembangunan Pustu Baru (5 Pustu)
Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan ke Rawat Inap (Puskesmas Martanda)	Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan ke Rawat Inap (Puskesmas Gunung Sari)	Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan ke Rawat Inap (Puskesmas Negara Batin)	Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan ke Rawat Inap (Puskesmas Sumberejo)	

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 Dinas Kesehatan yang tertuang dalam RPJMD yaitu : Peningkatan layanan kesehatan khususnya pada daerah yang sulit terjangkau melalui Kartu Tanggamus Sehat, Peningkatan kualitas sarpras pendidikan, revitalisasi RSUD, Puskesmas dan Pustu serta penyediaan alat kesehatan yang memadai dan Peningkatan fasilitasi pemberian Makan Bergizi Gratis dan percepatan penurunan prevalensi stunting, pembangunan pemuda dan olahraga, pengembangan seni dan budaya, penguatan literasi, pendidikan karakter dan agama, ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Tabel Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Penguatan Kualitas Manusia melalui Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan khususnya pada daerah yang sulit terjangkau melalui Kartu Tanggamus Sehat	
			Peningkatan kualitas sarpras pendidikan, revitalisasi RSUD, Puskesmas dan Pustu serta penyediaan alat kesehatan yang memadai	Puskesmas dan Pustu
		Revitalisasi Fasilitas Kesehatan, Pengembangan Sekolah Unggulan dan Dukungan Pemberian Makan Bergizi Gratis	Peningkatan fasilitasi pemberian Makan Bergizi Gratis dan percepatan penurunan prevalensi stunting, pembangunan pemuda dan olahraga, pengembangan seni dan budaya, penguatan literasi, pendidikan karakter dan agama, ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak	Prevalensi Stunting

BAB IV
PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan outputProgram, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

**Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanggamus**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Angka Harapan Hidup	T1. Meningkatkan Derajat Kesehatan				T1 Meningkatnya Derajat Kesehatan		
		S1.1 Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat			S1.1 Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat		
			OC.1.1.1 Angka Harapan Hidup		OC.1.1.1 Terpenuhinya kebutuhan anggaran penunjang urusan, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PROG.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				OT1.1.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)	OT1.1.1.1 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	KEG. 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						SUBKEG. 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

						SUBKEG. 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	
						SUBKEG. 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	
						SUBKEG. 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	
						SUBKEG. 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	
						SUBKEG. 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						SUBKEG. 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				OT1.1.1.2 Angka Kematian Bayi (AKB)	OT1.1.1.2 Persentase Ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEG. 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

						SUBKEG. 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						SUBKEG. 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						SUBKEG. 1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						SUBKEG. 1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						SUBKEG. 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						SUBKEG. 1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

						SUBKEG. 1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						SUBKEG. 1.2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
					OT1.1.1.3 Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KEG. 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						SUBKEG. 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						SUBKEG. 1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						SUBKEG. 1.3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						SUBKEG. 1.3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

						SUBKEG. 1.3.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						SUBKEG. 1.3.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						SUBKEG. 1.3.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
					OT1.1.1.4 Persentase peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya aparatur	KEG. 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						SUBKEG. 1.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						SUBKEG. 1.4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						SUBKEG. 1.4.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

						SUBKEG. 1.4.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						SUBKEG. 1.4.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						SUBKEG. 1.4.6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
						SUBKEG. 1.4.7 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
						SUBKEG. 1.4.8 Pemindahan Tugas ASN	
						SUBKEG. 1.4.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						SUBKEG. 1.4.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						SUBKEG. 1.4.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

					OT1.1.1.5 Persentase ketersediaan penunjang kelancaran administrasi perkantoran	KEG. 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						SUBKEG. 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						SUBKEG. 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						SUBKEG. 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						SUBKEG. 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						SUBKEG. 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						SUBKEG. 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

						SUBKEG. 1.5.7 Penyediaan Bahan/Material	
						SUBKEG. 1.5.8 Fasilitas Kunjungan Tamu	
						SUBKEG. 1.5.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						SUBKEG. 1.5.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						SUBKEG. 1.5.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					OT1.1.1.6 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KEG. 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						SUBKEG. 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

						SUBKEG. 1.6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						SUBKEG. 1.6.3 Pengadaan Alat Besar	
						SUBKEG. 1.6.4 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						SUBKEG. 1.6.5 Pengadaan Mebel	
						SUBKEG. 1.6.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						SUBKEG. 1.6.7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						SUBKEG. 1.6.8 Pengadaan Aset Tak Berwujud	
						SUBKEG. 1.6.9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

						SUBKEG. 1.6.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						SUBKEG. 1.6.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					OT1.1.1.7 Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG. 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						SUBKEG. 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						SUBKEG. 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						SUBKEG. 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						SUBKEG. 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

					OT1.1.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG. 1.8 Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan baik	
						SUBKEG. 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						SUBKEG. 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						SUBKEG. 1.8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	

						SUBKEG. 1.8.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						SUBKEG. 1.8.5 Pemeliharaan Mebel	
						SUBKEG. 1.8.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						SUBKEG. 1.8.7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						SUBKEG. 1.8.8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						SUBKEG. 1.8.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						SUBKEG. 1.8.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

						SUBKEG. 1.8.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						SUBKEG. 1.8.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
					OT1.1.1.9 Persentase Pemenuhan Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD	KEG. 1.9 Peningkatan Pelayanan BLUD	
						SUBKEG. 1.9.1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
					OT1.1.1.10 Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan Pelayanan Medical Check Up	KEG. 1.10 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
						SUBKEG. 1.10.1 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

					OT1.1.1.11 Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up	KEG. 1.11 Layanan Keuagandan Kesejahteraan DPRD	
						SUBKEG. 1.11.1 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
					OC.1.2.1 Angka Kematian Ibu (AKI)	PROG.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		S1.2 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan		OT1.1.1.3 Prevalensi Balita Stunting	OC.1.2.2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		
					OT1.1.2.1 Persentase Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	KEG. 2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG. 2.1.1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	

						SUBKEG. 2.1.2 Pembangunan Puskesmas	
						SUBKEG. 2.1.3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						SUBKEG. 2.1.4 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
						SUBKEG. 2.1.5 Pengembangan Puskesmas	
						SUBKEG. 2.1.6 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						SUBKEG. 2.1.7 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
						SUBKEG. 2.1.8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
						SUBKEG. 2.1.9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

						SUBKEG. 2.1.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
						SUBKEG. 2.1.11 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						SUBKEG. 2.1.12 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
						SUBKEG. 2.1.13 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						SUBKEG. 2.1.14 Pengembangan Rumah Sakit	
						SUBKEG. 2.1.15 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	

						SUBKEG. 2.1.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
						SUBKEG. 2.1.17 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	
						SUBKEG. 2.1.18 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				OT1.1.1.4 Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)	OT1.1.2.2 Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	KEG. 2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

						SUBKEG. 2.2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
						SUBKEG. 2.2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
						SUBKEG. 2.2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
						SUBKEG. 2.2.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
						SUBKEG. 2.2.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
						SUBKEG. 2.2.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	

						SUBKEG. 2.2.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
						SUBKEG. 2.2.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
						SUBKEG. 2.2.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
						SUBKEG. 2.2.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
						SUBKEG. 2.2.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	

						SUBKEG. 2.2.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
						SUBKEG. 2.2.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
						SUBKEG. 2.2.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
						SUBKEG. 2.2.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
						SUBKEG. 2.2.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	

						SUBKEG. 2.2.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
						SUBKEG. 2.2.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
						SUBKEG. 2.2.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
						SUBKEG. 2.2.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
						SUBKEG. 2.2.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	

						SUBKEG. 2.2.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
						SUBKEG. 2.2.23 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
						SUBKEG. 2.2.24 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				OT1.1.1.5 Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan		SUBKEG. 2.2.25 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
						SUBKEG. 2.2.26 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
						SUBKEG. 2.2.27 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	

						SUBKEG. 2.2.28 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
						SUBKEG. 2.2.29 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						SUBKEG. 2.2.30 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
						SUBKEG. 2.2.31 Operasional Pelayanan Puskesmas	
						SUBKEG. 2.2.32 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						SUBKEG. 2.2.33 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	

						SUBKEG. 2.2.34 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
						SUBKEG. 2.2.35 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
						SUBKEG. 2.2.36 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
						SUBKEG. 2.2.37 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
						SUBKEG. 2.2.38 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
						SUBKEG. 2.2.39 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
						SUBKEG. 2.2.40 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	

						SUBKEG. 2.2.41 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
						SUBKEG. 2.2.42 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
						SUBKEG. 2.2.43 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
						SUBKEG. 2.2.44 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	
						SUBKEG. 2.2.45 Pengelolaan Layanan Imunisasi	
						SUBKEG. 2.2.46 Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	
						SUBKEG. 2.2.47 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
					OT1.1.2.3 Presentase Sistem Informasi Kesehatan Yang Terintegrasi	KEG. 2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
						SUBKEG. 2.3.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

				OT1.1.1.6 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	OC.1.3.1 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	PROG.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					OT1.1.3.1 Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan	KEG. 3.1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG. 3.1.1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
						SUBKEG. 3.1.2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
					OT1.1.3.2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	KEG. 3.2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	

						SUBKEG. 3.2.1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						SUBKEG. 3.2.2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	
						SUBKEG. 3.2.3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					OT1.1.3.3 Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	KEG. 3.3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

						SUBKEG. 3.3.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				OT1.1.1.7 Persentase Capaian SPM Kesehatan	OC.1.4.1 Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	PROG.4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					OT1.1.4.1 Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	KEG. 4.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

						SUBKEG. 4.1.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					OT1.1.4.2 Persentase Izin Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	KEG. 4.2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
						SUBKEG. 4.2.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	

					OT1.1.4.3 Persentase jumlah Penertiban Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	KEG. 4.3 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
						SUBKEG. 4.3.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	

					OT1.1.4.4 Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	KEG. 4.4 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
						SUBKEG. 4.4.1Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
					OT1.1.4.5 Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	KEG. 4.5 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	

						SUBKEG. 4.5.1 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
					OT1.1.4.6 Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Diperiksa Post Market	KEG. 4.6 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
						SUBKEG. 4.6.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
					OC.1.5.1 Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	PROG.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

					OT1.1.5.1 Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	KEG. 5.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG. 5.1.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
						SUBKEG. 5.1.2 Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	
					OT1.1.5.2 Persentase Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	KEG. 5.2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

						SUBKEG. 5.2.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
						SUBKEG. 5.2.2 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					OT1.1.5.3 Persentase Kader Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan	KEG. 5.3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						SUBKEG. 5.3.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

**Tabel 4.1 (2) Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Renstra PD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	terpenuhinya kebutuhan anggaran penunjang urusan, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	70263650270	100%	79278418282	100%	79278418282	100%	79319993782	100%	78263130782	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	100%	100%	95859800	100%	328319400	100%	328319400	100%	338319400	100%	338319400	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	15709800	4 Dokumen	47701200	4 Dokumen	47701200	4 Dokumen	57701200	4 Dokumen	57701200	Renja, Renja Perubahan, Renstra, DHA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	15000000	3 Dokumen	36028200	3 Dokumen	36028200	3 Dokumen	36028200	3 Dokumen	36028200	Dokumen Pembahasan RKA 2x
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	15000000	3 Dokumen	13950000	3 Dokumen	13950000	3 Dokumen	13950000	3 Dokumen	13950000	Dokumen Pembahasan RKA Perubahan 2x
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10500000	1 Dokumen	10500000	1 Dokumen	10500000	1 Dokumen	10500000	1 Dokumen	10500000	DPA
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10500000	1 Dokumen	11540000	1 Dokumen	11540000	1 Dokumen	11540000	1 Dokumen	11540000	DPA Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	9150000	3 Dokumen	18540000	3 Dokumen	18540000	3 Dokumen	18540000	3 Dokumen	18540000	LKPJ, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	20000000	4 Dokumen	190060000	4 Dokumen	190060000	4 Dokumen	190060000	4 Dokumen	190060000	Lkj, Laporan SPM Semester 1, Laporan SPM Tahunan, DHA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	69160755170	100%	70888839794	100%	70888839794	100%	70888839794	100%	70888839794	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	822 Orang	822 Orang	59389790170	822 Orang	59389790170	822 Orang	59389790170	822 Orang	59389790170	822 Orang	59389790170	822 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	9416225000	2 Dokumen	10894240000	2 Dokumen	10894240000	2 Dokumen	10894240000	2 Dokumen	10894240000	Laporan Honor Jasa Tenaga Non ASN, Laporan Intensif Daerah Terpencil dan Kepulauan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	345190000	1 Dokumen	345110000	1 Dokumen	345110000	1 Dokumen	345110000	1 Dokumen	345110000	Laporan Realisasi Keuangan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9550000	1 Dokumen	97809624	1 Dokumen	97809624	1 Dokumen	97809624	1 Dokumen	97809624	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	11890000	1 Dokumen	11890000	1 Dokumen	11890000	1 Dokumen	11890000	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	0	4 Dokumen	50000000	4 Dokumen	50000000	4 Dokumen	50000000	4 Dokumen	50000000	Laporan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Laporan Pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Laporan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	0	6 Dokumen	50000000	6 Dokumen	50000000	6 Dokumen	50000000	6 Dokumen	50000000	Laporan Triwulanan I, Laporan Triwulanan II, Laporan Triwulanan III, Laporan Triwulanan IV, Laporan Semesteran, Laporan Tahunan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	55587000	100%	346866000	100%	346866000	100%	346866000	100%	346866000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	65350000	1 Dokumen	65350000	1 Dokumen	65350000	1 Dokumen	65350000	Dokumen RKBMD
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	Laporan Inventaris Barang
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	0	4 Dokumen	50000000	4 Dokumen	50000000	4 Dokumen	50000000	4 Dokumen	50000000	Neraca, Kertas Kerja, Laporan Persediaan ATK, Laporan Persediaan Obat dan BMHP
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	55587000	4 Dokumen	81516000	4 Dokumen	81516000	4 Dokumen	81516000	4 Dokumen	81516000	KIB A, B, C dan D
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya aparatur	100%	100%	12500000	100%	263850000	100%	263850000	100%	263850000	100%	308850000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	5000000	1 Unit	5000000	1 Unit	5000000	1 Unit	5000000	Fingerprint
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket	0	100 Paket	65350000	100 Paket	65350000	100 Paket	65350000	100 Paket	65350000	Pakaian Dinas beserta Atribut
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	5000000	1 Dokumen	5000000	1 Dokumen	5000000	1 Dokumen	5000000	DUK
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	5000000	1 Dokumen	5000000	1 Dokumen	5000000	1 Dokumen	5000000	Dokumen ANJAB ABK
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	2500000	1 Dokumen	2500000	1 Dokumen	2500000	1 Dokumen	2500000	Dokumen SKP Tahunan
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	12 Orang	12 Orang	0	12 Orang	2500000	12 Orang	2500000	12 Orang	2500000	12 Orang	2500000	12 Orang Pegawai
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	1000000	1 Laporan	1000000	1 Laporan	1000000	1 Laporan	1000000	Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	15 Orang	15 Orang	0	15 Orang	2500000	15 Orang	2500000	15 Orang	2500000	15 Orang	2500000	15 Orang ASN yang dipindahtugaskan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	12500000	4 Orang	75000000	4 Orang	75000000	4 Orang	75000000	4 Orang	75000000	4 Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	0	50 Orang	50000000	50 Orang	50000000	50 Orang	50000000	50 Orang	50000000	50 Orang Mengikuti Sosialisasi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	0	50 Orang	50000000	50 Orang	50000000	50 Orang	50000000	50 Orang	50000000	50 Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	331104100	100%	2023005588	100%	2023005588	100%	2054581088	100%	2023005588	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	8045000	5 Paket	25000000	5 Paket	25000000	5 Paket	25000000	5 Paket	25000000	Paket Gedung Utama, Paket Instalasi Farmasi, Paket Gedung PSC, Paket Gedung P2, Paket Gedung Kesmas
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	18000000	6 Paket	60000000	6 Paket	60000000	6 Paket	91575500	60000000	60000000	Printer 2 paket, Laptop 2 paket, Monitor PC 2 paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15861000	1 Paket	15000000	1 Paket	15000000	1 Paket	15000000	1 Paket	15000000	1 Paket Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	70400000	4 Paket	158000000	4 Paket	158000000	4 Paket	158000000	4 Paket	158000000	Paket Logistik Coffe Morning, Paket Logistik Rakor Bulanan, Paket Logistik Kegiatan Program Kesehatan, Paket Logistik Rapat Mingguan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	33773100	6 Paket	580000000	6 Paket	580000000	6 Paket	580000000	6 Paket	580000000	Cetak Spanduk , Kartu Tanggamus Sehat, Cetak KOP Surat, Cetak Kwitansi Pengeluaran, 2 Paket Fotocopy
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	Dokumen Bahan Bacaan
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34290000	1 Paket	104111588	1 Paket	104111588	1 Paket	104111588	1 Paket	104111588	Paket Alat Tulis Kesehatan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan	2500000	12 Laporan	2500000	12 Laporan	2500000	12 Laporan	2500000	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu setiap bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	150735000	1 Laporan	975894000	1 Laporan	975894000	1 Laporan	975894000	1 Laporan	975894000	Laporan Realisasi Kegiatan Perjalanan Dinas
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2500000	2 Dokumen	2500000	2 Dokumen	2500000	2 Dokumen	2500000	Dokumen Surat Masuk, Dokumen Surat Keluar

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	0	4 Dokumen	50000000	4 Dokumen	50000000	4 Dokumen	50000000	4 Dokumen	50000000	Validasi ASPAK Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan LabKesmas
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	19723000	100%	1952000000	100%	1952000000	100%	1952000000	100%	1952000000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	350000000	1 Unit	350000000	1 Unit	350000000	1 Unit	350000000	1 Unit Kendaraan Kepala Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0	5 Unit	1250000000	5 Unit	1250000000	5 Unit	1250000000	5 Unit	1250000000	1 Unit Sekertariat, 1 Unit Bidang Pengendalian Penyakit, 1 Unit Bidang Pelayanan Kesehatan, 1 Unit Bidang SDK, 1 Unit Bidang Kesehatan Keluarga
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9723000	9 Paket	150000000	9 Paket	150000000	9 Paket	150000000	9 Paket	150000000	3 Paket Sofa, 3 Paket Meja Kursi Kerja, 3 Paket Lemari Arsip
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	10000000	5 Unit	32000000	5 Unit	32000000	5 Unit	32000000	5 Unit	32000000	AC floor standing 4 unit
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	150000000	1 Unit	150000000	2 Unit	150000000	1 Unit	150000000	1 Unit Gedung Barang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0	2 Unit	10000000	2 Unit	10000000	2 Unit	10000000	2 Unit	10000000	2 Unit Rak Barang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0	2 Unit	10000000	2 Unit	10000000	2 Unit	10000000	2 Unit	10000000	2 Unit Lemari Barang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	183540000	100%	1070287500	100%	1070287500	100%	1070287500	100%		

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan	2500000	12 Laporan	2500000	12 Laporan	2500000	12 Laporan	2500000	12 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	183540000	12 Laporan	944787500	12 Laporan	944787500	12 Laporan	944787500	12 Laporan	944787500	12 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan	117000000	12 Laporan	117000000	12 Laporan	117000000	12 Laporan	117000000	12 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	0	6 Laporan	6000000	6 Laporan	6000000	6 Laporan	6000000	6 Laporan	6000000	6 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan baik	100%	100%	404581200	100%	2138040000	100%	2138040000	100%	2138040000	100%	2138040000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	234809200	23 Unit	57500000	23 Unit	57500000	23 Unit	57500000	23 Unit	57500000	Kendaraan Dinas Kepala Dinas (2), Sekertaris (1), Kabid (4), Struktural/Fungsional (15), PSC (1)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	0	10 Unit	350000000	10 Unit	350000000	10 Unit	350000000	10 Unit	350000000	5 Kabid, 1 Kadis, 1 PSC, 1 Ambulance, 2 Operasional Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	0	6 Unit	6000000	6 Unit	6000000	6 Unit	6000000	6 Unit	6000000	Kursi kerja, Meja, Sofa, Lemari
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	19900000	10 Unit	45620000	10 Unit	45620000	10 Unit	45620000	10 Unit	45620000	Ac
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	

[illegible]

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	100%	100%	43104388319	100%	39600000000	100%	39700000000	100%	39850000000	100%	40100000000	
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	5000000000	1 Unit	5000000000	1 Unit	5000000000	1 Unit	5000000000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	249600000	1 Unit	1000000000	1 Unit	1000000000	1 Unit	1000000000	1 Unit	1000000000	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit	6 Unit	#####	10 Unit	#####	10 Unit	#####	10 Unit	#####	10 Unit	#####	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4 Unit	4 Unit	0	5 Unit	#####	5 Unit	#####	5 Unit	#####	5 Unit	2250000000	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	#####	5 Unit	#####	5 Unit	#####	5 Unit	#####	5 Unit	#####	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	-	2 Unit	#####	2 Unit	#####	2 Unit	#####	2 Unit	#####	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	2 Unit	0	2 Unit	50000000	2 Unit	50000000	2 Unit	50000000	2 Unit	50000000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	#####	5 Unit	#####	5 Unit	#####	6 Unit	#####	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit	6 Unit	#####	6 Unit	#####	6 Unit	#####	6 Unit	#####	6 Unit	#####	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	3 Unit	-	3 Unit	#####	3 Unit	#####	3 Unit	#####	3 Unit	#####	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	#####	4 Unit	#####	4 Unit	#####	4 Unit	#####	4 Unit	#####	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional <i>Maintainance Center</i>	260 Unit	260 Unit	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional <i>Maintainance Center</i>	500000000	260 Unit	500000000	260 Unit	500000000	260 Unit	500000000	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional <i>Maintainance Center</i>
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4 Unit	4 Unit	-	4 Unit	#####	4 Unit	#####	4 Unit	#####	4 Unit	#####	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	500000000	1 Unit	500000000	1 Unit	500000000	1 Unit	500000000	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	#####	1 Paket	#####	1 Paket	#####	1 Paket	#####	1 Paket	#####	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 Keluarga	100 Keluarga	0	100 Keluarga	100000000	100 Keluarga	100000000	100 Keluarga	100000000	100 Keluarga	100000000	jumlah keluarga yang mengikuti Program PIS-PK
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	8 layanan	8 layanan	0	8 layanan	100000000	8 layanan	100000000	8 layanan	100000000	8 layanan	100000000	Pelayanan daerah terpencil
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	#####	1 Paket	#####	1 Paket	#####	1 Paket	#####	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 26 Puskesmas

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100%	100%	20934068954	100%	24249093089	100%	25777889700	100%	27801568450	100%	28829555200	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11380 Orang	11380 Oran	214115000	11380 Orang	164875000	11380 Orang	164875000	11380 Orang	164875000	11380 Orang	164875000	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10778 Orang	10778 Oran	240450000	10778 Orang	522584000	10778 Orang	522584000	10778 Orang	522584000	10778 Orang	522584000	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10625 Orang	10625 Oran	231157500	10625 Orang	143025000	10625 Orang	143025000	10625 Orang	143025000	10625 Orang	143025000	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49708 Orang	49708 Oran	499950000	49708 Orang	116085000	49708 Orang	116085000	49708 Orang	116085000	49708 Orang	116085000	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93958 Orang	93958 Oran	499950000	93958 Orang	119930000	93958 Orang	119930000	93958 Orang	119930000	93958 Orang	119930000	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	396660 Orang	396660 Ora	500000000	396660 Orang	127965000	396660 Orang	127965000	396660 Orang	127965000	396660 Orang	127965000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54034 Orang	54034 Oran	672000000	54034 Orang	114050000	54034 Orang	114050000	54034 Orang	114050000	54034 Orang	114050000	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123339 Orang	123339 Ora	500000000	123339 Orang	120610000	123339 Orang	120610000	123339 Orang	120610000	123339 Orang	120610000	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3738 Orang	3738 Orang	50000000	3738 Orang	115655000	3738 Orang	115655000	3738 Orang	115655000	3738 Orang	115655000	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1140 Orang	1140 Orang	193974500	1140 Orang	115655000	1140 Orang	115655000	1140 Orang	115655000	1140 Orang	115655000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11162 Orang	11162 Oran	50670000	11162 Orang	119875000	11162 Orang	119875000	11162 Orang	119875000	11162 Orang	119875000	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14317 Orang	14317 Oran	50340000	14317 Orang	119875000	14317 Orang	119875000	14317 Orang	119875000	14317 Orang	119875000	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	39480000	1 Dokumen	39480000	1 Dokumen	39480000	1 Dokumen	39480000	Dokumen KLB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	25000000	1 Dokumen	68228000	1 Dokumen	68228000	1 Dokumen	68228000	1 Dokumen	68228000	Dokumen Laporan Krisis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	184765000	1 Dokumen	24700000	1 Dokumen	24700000	1 Dokumen	24700000	1 Dokumen	24700000	Laporan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	600 orang	600 orang	102891000	600 orang	55005000	600 orang	55005000	600 orang	55005000	600 orang	55005000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	134471000	3 Dokumen	88510000	3 Dokumen	88510000	3 Dokumen	88510000	3 Dokumen	88510000	Laporan SIPEKAM, Laporan SISTBM, Laporan Limbah

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	296834000	4 Dokumen	300665000	4 Dokumen	300665000	4 Dokumen	300665000	4 Dokumen	300665000	Laporan Kegiatan Posyandu Aktif, Laporan Kegiatan TPP Posyandu, Laporan Kegiatan Tanggamus Expo, Laporan Kegiatan Pekan Raya Lampung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	49565000	1 Dokumen	36675000	1 Dokumen	36675000	1 Dokumen	36675000	1 Dokumen	36675000	Dokumen Laporan Kestrad
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	186999700	1 Dokumen	47500000	1 Dokumen	47500000	1 Dokumen	47500000	1 Dokumen	47500000	Laporan Pelaksanaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	143697 Orang	143697 Orang	0	150883 Orang	84000000	158427 Orang	88200000	166348 Orang	92610000	174665 Orang	97240500	174665 orang di screening kesehatan Jiwa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	129327 Orang	129327 Orang	0	135793 Orang	78750000	142583 Orang	82687500	149712 Orang	86821875	157198 Orang	92000000	157198 Orang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	25000000	1 Dokumen	25000000	1 Dokumen	25000000	4 Dokumen	25000000	Laporan kejadian bencana (banjir, putting beliung, longsor)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6 Dokumen	6 Dokumen	345773000	6 Dokumen	85320000	6 Dokumen	85320000	6 Dokumen	85320000	6 Dokumen	85320000	Laporan SPM (usia produktif, odg, dm, ht, tb, hiv)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	17282366841	1 Dokumen	18448278389	1 Dokumen	20000000000	1 Dokumen	22000000000	1 Dokumen	23000000000	Dokumen Uhcs
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	129327 Orang	129327 Orang	0	135793 Orang	78750000	142583 Orang	82687500	149712 Orang	86821875	157198 Orang	92000000	157198 Orang mendapatkan Deteksi dini / Screening Kesehatan Jiwa & Napza Di Puskesmas & Sekolah
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	26 Paket	26 Paket	49999800	26 Paket	45000000	26 Paket	45000000	26 Paket	45000000	26 Paket	45000000	Paket hasil pemeriksaan spesimen penyakit potensial KLB

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	49800000	1 Dokumen	98560000	1 Dokumen	98560000	1 Dokumen	98560000	1 Dokumen	98560000	Dokumen forum Kabupaten/ Kota Sehat
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Dokumen	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	25000000	1 Dokumen	25000000	1 Dokumen	25000000	1 Dokumen	25000000	Dokumen Pertemuan peningkatan kapasitas petugas pelaksana\ a RME Puskesmas
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	Dokumen Pelayanan Rumah sakit
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	34400000	1 Dokumen	180000000	1 Dokumen	185000000	1 Dokumen	186000000	1 Dokumen	189000000	berita acara bok puskesmas
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	50000000	1 dokumen	50000000	1 dokumen	50000000	1 dokumen	50000000	Laporan Pelayanan Pustu
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	196405000	1 Dokumen	1400130500	1 Dokumen	1400130500	1 Dokumen	1400130500	1 Dokumen	1400130500	Dokumen akreditasi
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Dokumen	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	132812200	1 Dokumen	132812200	1 Dokumen	132812200	1 Dokumen	132812200	laporan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	11545000	1 Dokumen	11545000	1 Dokumen	11545000	1 Dokumen	11545000	laporan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	113.4	1 Unit	200000000	1 Unit	200000000	1 Unit	200000000	1 Unit	200000000	laporan PSC 119
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang	0	100 Orang	50000000	100 Orang	50000000	100 Orang	50000000	100 Orang	50000000	Jumlah orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang	0	100 Orang	50000000	100 Orang	50000000	100 Orang	50000000	100 Orang	50000000	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	100 Orang	0	100 Orang	50000000	100 Orang	50000000	100 Orang	50000000	100 Orang	50000000	100 orang yang terinfeksi malaria
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	7 Tatanan	0	7 Tatanan	100000000	7 Tatanan	50000000	7 Tatanan	50000000	8 Tatanan	50000000	Penerapan KTR di 7 Tatanan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	427396500	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	Laporan SPM usia pendidikan dasar
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	0	2 Dokumen	120000000	2 Dokumen	130000000	2 Dokumen	140000000	2 Dokumen	150000000	laporan spm semester 1, laporan SPM Tahunan
Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	4 Dokumen	69505000	4 Dokumen	100000000	4 Dokumen	100000000	4 Dokumen	100000000	4 Dokumen	100000000	- Laporan SPM Ibu Hamil - Laporan SPM Ibu Bersalin - Laporan SPM Bayi Baru Lahir - Laporan SPM Balita
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	laporan SPM lanjut usia
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	Laporan Hasil Pelayanan Imunisasi
Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	1 Dokumen	50000000	laporan Rujukan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	25000000	1 Dokumen	#####	1 Dokumen	#####	1 Dokumen	#####	laporan kegiatan pemeriksaan kesehatan Haji
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Sistem Informasi Kesehatan Yang Terintegrasi	100%	100%	52875000	100%	80000000	100%	90000000	100%	100000000	100%	110000000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	52875000	4 Dokumen	80000000	4 Dokumen	90000000	4 Dokumen	100000000	4 Dokumen	110000000	Buku Profil Kesehatan, PDRB, EPSS, Laporan SIK
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	80%	80%	689920000	80%	1066354000	80%	1263575000	80%	1353575000	80%	1423575000	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan	100%	100%	21770000	100%	93575000	100%	133575000	100%	123575000	100%	143575000	
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	21770000	1 dokumen	13575000	1 dokumen	13575000	1 dokumen	13575000	1 dokumen	13575000	Dokumen prizinan
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	80000000	1 dokumen	120000000	1 dokumen	110000000	1 dokumen	130000000	dokumen Pengawasan Perizinan

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	100%	100%	618150000	100%	430000000	100%	430000000	100%	430000000	100%	430000000	
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	180000000	1 Dokumen	180000000	1 Dokumen	180000000	1 Dokumen	180000000	dokumen Renbut
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	104 orang	104 orang	618150000	104 orang	200000000	104 orang	200000000	104 orang	200000000	104 orang	200000000	104 jumlah orang yang mengikuti pelatihan
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	500000000	1 Dokumen	500000000	1 Dokumen	500000000	1 Dokumen	500000000	Laporan SDM Berkompentensi
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	500000000	100%	542779000	100%	700000000	100%	800000000	100%	850000000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	200 Orang	500000000	200 Orang	542779000	200 Orang	700000000	200 Orang	800000000	200 Orang	850000000	Jumlah SDM yang memiliki STR
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	100%	100%	295776000	100%	1048384000	100%	1058384000	100%	1059384000		1060384000	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	100%	100%	0	100%	800000000	100%	900000000	100%	910000000	100%	920000000	

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	80000000	1 Dokumen	90000000	1 Dokumen	91000000	1 Dokumen	92000000	Dokumen Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Izin Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100%	100%	0	100%	220000000	100%	220000000	100%	220000000	100%	220000000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	220000000	1 Dokumen	220000000	1 Dokumen	220000000	1 Dokumen	220000000	Dokumen Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	100%	295776000	100%	520584000	100%	520584000	100%	520584000	100%	520584000	

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	295776000	1 Dokumen	520584000	1 Dokumen	520584000	1 Dokumen	520584000	1 Dokumen	520584000	Dokumen Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%	100%	0	100%	35500000	100%	35500000	100%	35500000	100%	35500000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	35500000	1 Dokumen	35500000	1 Dokumen	35500000	1 Dokumen	35500000	Dokumen Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%	100%	0	100%	35500000	100%	35500000	100%	35500000	100%	35500000	
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	4 Dokumen	35500000	4 Dokumen	35500000	4 Dokumen	35500000	4 Dokumen	35500000	Dokumen Penerbitan Stiker Jajanan dan sentra makanan jajanan

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Diperiksa Post Market	100%	100%	0	100%	156800000	100%	156800000	100%	156800000	100%	156800000	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	156800000	1 Unit	156800000	1 Unit	156800000	1 Unit	156800000	Dokumen Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	60%	60%	262129000	60%	503825000	60%	524825000	60%	545825000	60%	566825000	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100%	100%	217372000	100%	20595000	100%	21595000	100%	22595000	100%	23595000	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	217372000	2 Dokumen	11000000	2 Dokumen	12000000	2 Dokumen	13000000	2 Dokumen	14000000	Laporan Kegiatan Lomba Kesorak, Laporan Pertanggungjawaban Hibah
Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	4 Unit	4 Unit	0	4 Unit	9595000	4 Unit	9595000	4 Unit	9595000	4 Unit	9595000	TTG daerah rawan banjir
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	44757000	100%	179685000	100%	179685000	100%	179685000	100%	179685000	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	44757000	1 Dokumen	79685000	1 Dokumen	79685000	1 Dokumen	79685000	1 Dokumen	79685000	Dokumen Laporan Kegiatan Germas

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	250Keluarga	250Keluarga	0	250Keluarga	100000000	250 Keluarga	100000000	250 Keluarga	100000000	250 Keluarga	100000000	Kunjungan Rumah
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan	100%	100%	0	100%	303545000	100%	323545000	100%	343545000	100%	363545000	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	303545000	1 Dokumen	323545000	1 Dokumen	343545000	1 Dokumen	363545000	Laporan Kegiatan Pelatihan Kader

Tabel 4.1 (3) Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penguatan Kualitas Manusia Melalui Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Kegiatan : Revitalisasi Fasilitas Kesehatan	
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
			Pembangunan Puskesmas	
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
			Pengembangan Puskesmas	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Pengembangan Rumah Sakit	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
			Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	

Tabel 4.2 Subkegiatan pada PD yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OI,AHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA (GENERASI MILENI,AL DAN GENERASI Z), DAN PENYANDANG DISABILITAS	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan GratisPenuntasan TBC		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis			
	Pengendalian Penyakit Menular Lainnya		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Peningkatan Upaya Kesehatan Jiwa		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
	Pembudayaan Hidup Sehat dan Pengendalian Faktor Resiko PTM		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok
	Investasi Pelayanan Kesehatan Primer		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
	Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
	Penguatan JKN dan Pendanaan Kesehatan		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	Penguatan Tata Kelola, Data, Informasi dan Inovasi Teknologi Kesehatan		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Tabel 4.2 (2) Intervensi Perangkat Daerah Pada Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung Dalam Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029

[illegible]

Tabel 4.3 Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi

NO	VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD	SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD	NSPK PD	USULAN INOVASI	OUTPUT	OUTCOME	KETERANGAN
1	VISI : Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas	Angka Harapan Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI)	Bumil Ceria	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Penurunan Angka Kematian Ibu	
	MISI : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		Angka Kematian Bayi (AKB)				
			Prevalensi Balita Stunting	Gebyar Penikur (Gerakan Penimbangan dan Pengukuran)	Jumlah Balita yang dilakukan penimbangan dan pengukuran	Prevalensi Stunting	
			Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)	Raning Cabi (Gerakan Meningkatkan Capaian TB)	Jumlah Penemuan Kasus TB	Penurunan CNR	
			Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan				
			Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan				
			Persentase Capaian SPM Kesehatan				

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanggamus**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	82.0	81.0	71.0	69.0	68.0	67.0	
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.0	
3	Prevalensi Balita Stunting	%	14.2	14.0	13.8	13.6	13.3	13.1	
4	Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)	Angka	418	349	293	252	221	191	
5	Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	%	98.5	98.8	99.1	99.4	99.7	100.0	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	Angka	84.67	84.73	84.83	84.9	85	85.07	
7	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanggamus**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna	%	46,15	46,15	46,15	46,15	53,85	53,85	
2	Persentase Puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan	%	23,08	26,92	30,77	38,46	50	50	

BAB V

PENUTUP

Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus periode 2025-2029 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus menetapkan visi dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dilanjutkan dengan merumuskan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan.

Diharapkan rencana pembangunan kesehatan yang telah tertuang dalam dokumen ini dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanggamus yang setinggi-tingginya sesuai yang diamanahkan RPJMD Kabupaten Tanggamus.

Kotaagung, Juni 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanggamus,



TAUFIK HIDAYAT, SE, M.Kes
NIP. 19661127 198902 1 001